

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA DALAM  
KEADAAN *COVID-19* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Celine Pricilia Sumarso  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara hukum dengan segala aspek kehidupannya yang diatur oleh hukum. Salah satunya mengenai hubungan industrial yang menyangkut tenaga kerja, yakni hukum ketenagakerjaan yang diciptakan untuk mengatur mengenai hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan hasil campur tangan pemerintah untuk melindungi para pihak terutama pekerja yang berada dalam posisi tidak seimbang, karena faktanya pada masa pandemi *covid-19* yang terjadi sejak tahun 2020 masih terdapat tindakan pengusaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga timbulnya konsekuensi bagi pekerja yang dikurangi haknya oleh pengusaha yang berlaku semena-mena. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apakah terdapat perlindungan hukum terhadap pekerja pada masa pandemi *covid-19*. Melalui penelitian yang dilakukan dengan metode *statute approach* dan *conceptual approach* ditemukan bahwa adanya ketidakjelasan dari pemerintah terkait penerbitan regulasi dalam menanggulangi dampak dari pandemi *covid-19* bagi pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, konsekuensi yang hukum yang timbul adalah perlunya regulasi baru untuk memperjelas tindakan mana saja yang dapat dilakukan oleh pengusaha pada masa pandemi *covid-19* tanpa mengurangi hak dari para pekerja dan sanksi bagi pengusaha yang melanggar hak asasi manusia para pekerja dengan mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja.

**Kata kunci:** (Ketenagakerjaan, Hak Pekerja, Pemenuhan Hak)

***LEGAL PROTECTION OF WORKERS RIGHTS IN CIRCUMSTANCES OF  
COVID-19 REVIEW OF LAW NUMBER 39 OF 1999 CONCERNING  
HUMAN RIGHTS***

Celine Pricia Sumarso  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., H. Heru Susanto, S.H., M.Hum.

*ABSTRACT*

*Indonesia is a constitutional state with all aspects of life that are regulated by law. One of them is about industrial relations which concerns labor, namely labor law which was created to regulate the employment relationship between workers and employers. With the presence of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which is the result of government intervention to protect parties, especially workers who are in an unbalanced position, due to the fact that during the Covid-19 pandemic that has occurred since 2020 there are still actions of employers that are not in accordance with provisions of regulations or policies that have been issued by the government, resulting in consequences for workers whose rights are reduced by employers who apply arbitrarily. This study aims to examine whether there is legal protection for workers during the Covid-19 pandemic. Through research conducted with the statute approach and conceptual approach, it was found that there was uncertainty from the government regarding the issuance of regulations in dealing with the impact of the Covid-19 pandemic for workers and employers. Thus, the legal consequence that arises is the need for new regulations to clarify which actions employers can take during the Covid-19 pandemic without reducing the rights of workers and sanctions for employers who violate workers' human rights by reducing their rights that the workers should have earned.*

**Keywords:** (*Employment, Workers Rights, Fulfillment of Rights*)